TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA JUDI ONLINE BERDASARKAN PASAL 27 AYAT 2 UU ITE DI UNIT CYBER CRIME POLDA BANTEN

Mochamad Khadafi Amir¹, Iron Fajrul Aslami², Safiulloh³

Dafikhadafi121201@gmail.com¹, ironfajrul.binabangsa@gmail.com², safiulloh87@yahoo.com³

Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Penulis Mochamad Khadafi Amir 12012000052. Maraknya kasus judi online menjadi persoalan penting bagi kita semua dikarenakan mudahnya mengakses situs perjudian dan mudahnya memainkan judi online yang menjadi faktor meningkatnya kasus ini. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji Permasalahan tentang penetapan tersangka kasus judi online dalam pasal 27 ayat 2 undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang masih belum menemukan keefektifan dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peran penegak hukum sangat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak perjudian. Kepolisian sebagai penegak hukum memiliki tugas dan fungsi untuk mencegah dan menanggulangi segala bentuk kejahatan, termasuk perjudian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian harus meningkatkan efektivitas yurisdiksi dan ekstradisi serta meningkatkan Kerjasama dengan negara lain, hal ini menjadi upaya dan faktor pendorong agar kepolisian dapat memberantas judi online ke Tingkat yang lebih tinggi. Dikarenakan para bandar dan pembuat situs judi online ini diketahui berada diluar negeri dan sulit ditangkap yang menjadikan faktor penghambat para pihak penegak hukum dalam memberantas judi online.

Kata Kunci: Judi Online, Kepolisian, Penegakan hukum.

ABSTRACT

The rise of online gambling cases is an important problem for all of us because of the ease of accessing gambling sites and the ease of playing online gambling which is a factor in the increase in this case. The purpose of this study is to examine the problem of determining suspects in online gambling cases in article 27 paragraph 2 of the electronic information and transaction law which still has not found effectiveness in its implementation. The method used is a descriptive qualitative method with a qualitative approach. The role of law enforcement is indispensable to prevent and overcome gambling acts. The police as law enforcers have the duty and function to prevent and overcome all forms of crime, including gambling. Based on the results of the study, it can be concluded that the police must increase the effectiveness of jurisdiction and extradition and increase cooperation with other countries, this is an effort and a driving factor so that the police can eradicate online gambling to a higher level. Because the bookmakers and creators of these online gambling sites are known to be abroad and difficult to arrest, which is a factor that hinders law enforcement parties in eradicating online gambling.

Keywords: Online Gambling, Police, Law Enforcement

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat membawa perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Kreativitas manusia semakin meningkat dan mendorong penemuan-penemuan di bidang teknologi. salah satu produk kreativitas manusia tersebut adalah internet. Kemajuan Teknologi informasi dan komunikasi tersebut mengakibatkan terjadinya revolusi interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat juga telah dirasakan akibat masuknya pengaruh internet. Penggunaan internet yang semakin mudah telah di salah gunakan orang untuk permainan judi. Awalnya orang mengakses game

online, selanjutnya karena rasa penasaran dan rasa ingin tahu, para remaja mengikuti permainan judi online.

Pada awalnya pemanfaatan internet digunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari seperti e-commerce, e-banking, e-government dan e-learning. Keberadaan dan pemanfaatan internet saat ini seperti pedang bermata dua, selain memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, ternyata dapat menjadi sarana untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Pelaku perjudian online memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern, sehingga lebih menguntungkan bagi para pelaku judi online tersebut karena tidak mengharuskan mereka untuk bertemu secara langsung.

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit Masyarakat dan masuk kualifikasi kejahatan atau tindak pidana yang dimana dalam Sejarah dari generasi ke generasi tidak mudah untuk diberantas. Maraknya perjudian akan merusak system social Masyarakat itu sendiri, perilaku sosial masyarakat cenderung mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya jaman yang serba kompleks akibat kemajuan teknologi, yang berdampak pada melemahnya nilai-nilai social yang ada dalam Masyarakat, hal inilah yang menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai masalah social dan sulitnya dalam memberantas Perjudian online semakin berkembang dengan berbagai cara dan bentuk yang beragam mengikuti perkembangan zaman serta teknologi yang semakin canggih. Umumnya perjudian dipandang sebagai sebuah tindakan kejahatan yang dilarang dalam ketentuan hukum pidana. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat, kegiatan judi juga mengalami pergeseran menuju judi online yang lebih nyaman dan aman. Secara tidak langsung perkembangan teknologi informasi telah membuat terciptanya dunia tanpa batas (borderless world) dan membawa perubahan budaya dan social yang besar dengan sangat cepat, sehingga kini menjadi seperti pedang bermata dua karena tidak hanya membantu dalam segi positif, tetapi juga merupakan cara yang efektif dalam melanggar hukum.

Permainan judi online di Indonesia semakin meningkat seiring dengan peningkatan kemudahan faktor pendukung untuk mengakses internet baik computer, notebook, ataupun gadget. pesatnya perkembangan internet pada saat sekarang bukanlah suatu hal yang aneh karena perkembangan internet berbanding lurus dengan perkembangan bisnis perjudian (internet gambling). sebenarnya hal ini tidak terlepas dari fakta-fakta semakin banyaknya situs-situs perjudian dan permainan judi yang dengan mudah ditemukan dan diakses melalui internet. Karena mudahnya mereka mengakses dan mendapatkan uang dari judi online tersebut dan ketika seseorang kalah dalam judi online pemain berusaha menebus uang yang hilang dengan berjudi Kembali dengan jumlah uang yang sama dengan harapan mendapat kemenangan untuk mengembalikan uang yang hilang dan juga meraih keuntungan. Judi online ini bukan sembarang judi melainkan permainan yang mudah dipahani oleh setiap orang maka dari itu penyebab maraknya pemain judi online juga didasari oleh hal tersebut.

Di Indonesia sendiri polisi telah mengungkap ratusan kasus judi online sejak Januari hingga april 2024, terdapat 792 kasus dan 1.158 tersangka yang telah ditangkap sejak Januari hingga april 2024, apabila mundur ke data tahun 2023 ada 1.196 kasus dengan jumlah 1.967, jika total dari 2023 sampai april 2024 ada 1.988 kasus dengan jumlah 3.145 tersangka . Untuk dibanten sendiri polda banten berhasil mengungkap 39 kasus dengan 89 tersangka, dari total 39 kasus itu dari Ditreskrim polda banten sebanyak 7 kasus dengan 18 tersangka, polresta tanggerang sebanyak 7 kasus dengan 19 tersangka, dan polres cilegon sebanyak 3 kasus dengan 11 tersangka, lalu polres pandeglang sebanyak 2 kasus dengan 6 tersangka, polresta serang kota sebanyak 14 kasus dengan 19 tersangka, serta polres lebak

sebanyak 3 kasus dengan 8 tersangka. Dan yang baru-baru ini terungkap adalah kasus judi online yang terjadi di kota Tangerang Banten yang dimana 11 orang diamankan, berawal dari patroli cyber yang akhirnya berhasil menggerebek 3 rumah mewah yang dijadikan markas judi online. Para tersangka memiliki perannya masing-masing, yang dimana bisnis tersebut dijalankan dan dikelola oleh dua orang pelaku utama, selain sebagai pengelola, mereka juga bertugas merekrut para karyawan lainnya yang kini sudah ikut diringkus polisi, pelaku utama selaku pengelola bertugas untuk menyediakan website, kemudian menyediakan tempat ataupun kantor, kemudian menyediakan peralatan, menyiapkan sarana dan prasarana, serta merekrut dan melakukan pelatihan terhadap para karyawan.

Pemerintah mendata lima provinsi yang paling banyak warganya terpapar judi online di Indonesia, salah satunya adalah provinsi Banten yang terus meningkat kasusnya dari data PPATK (pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan), provinsi Banten menempati posisi kelima dengan pelaku judi online sebanyak 150.302 dan uang yang beredar Rp.1,022 triliun. Dengan data tersebut dapat dilihat bahwa kini kasus judi online terus meningkat dan bukan hanya di kota, judi online pun telah merabah masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Polisi terus berupaya menangani berbagai kasus judi online dengan menangkap sejumlah tersangka, namun begitu, sebagian besar yang ditangkap adalah para pemain dan belum ada pelaku setingkat bandar yang berhasil ditangkap, yang dimana sejumlah pihak beranggapan bahwa penangkapan pelaku judi online baru menasar ke level bawah saja, Fenomena Judi Online yang marak saat ini adalah judi yang banyak digemari oleh masyarakat. Pada dasarnya judi bertentangan dengan kesusilaan agama, dan Pancasila serta membahayakan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pandangan Masyarakat terhadap judi online ini sangatlah biasa, hal ini dianggap suatu hal untuk hiburan, yang berdampak sangat buruk bagi masyarakat. Perjudian umum (konvensional) dan perjudian online memiliki sifat yang sama yaitu berjudi namun keduanya adalah perbuatan yang berbeda dan berdiri sendiri sebagaimana perjudian umum diatur dalam ketentuan pidana umum (KUHP) dan perjudian online diatur secara khusus dalam undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE).

Perjudian secara online telah diatur secara khusus dalam pasal 27 ayat 2 UU ITE dan Undang-Undang Republik Indonesia no 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur bahwa : “Setiap Orang yang dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Orang yang melanggar ketentuan pasal tersebut berpotensi dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 10 miliar rupiah, sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 3 UU 1/2024. Dari Pasal 27 ayat 2 UU terdapat beberapa penjelasan unsur sebagai berikut:

1. “Mendistribusikan” adalah mengirimkan dan menyebarkan informasi atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau banyak pihak melalui system elektronik.
2. "Mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik.
3. "Membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

UU ITE pertama kali disahkan melalui UU No.11 Tahun 2008, sebelum akhirnya direvisi dengan UU No.19 Tahun 2016. Berdasarkan UU ITE, informasi elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tulisan, suara, foto atau gambar, surat elektronik (electronic mail), telegram, kode akses dan lain sebagainya. Sementara, transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer,

jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. aturan ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur UU ITE. Selain judi online, ujaran kebencian dan berita hoax juga termasuk dalam pelanggaran UU ITE, Saat ini penyebaran informasi atau berita melalui media online tidak hanya dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal oleh masyarakat, namun oleh siapa saja pengguna internet dapat berperan dalam penyebaran suatu informasi. Sayangnya banyak informasi atau berita yang disebarluaskan secara individu atau berkelompok lebih banyak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau teindikasi hoax. Hoax merupakan informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau yang benar-benar bukan merupakan fakta yang terjadi. Selain judi online hoax juga dapat merugikan Masyarakat dengan banyaknya persebaran berita yang tidak jelas, di antaranya, asal kata hoax diyakini ada sejak ratusan tahun sebelumnya, yakni 'hocus' dari mantra 'hocus pocus', frasa yang kerap disebut oleh pesulap, serupa 'sim salabim'. Bahkan Boese (2002) dalam bukunya "Museum of Hoaxes" menuliskan bahwa jauh sebelum itu, istilah hoax pertama kali terpublikasi melalui almanak atau penanggalan palsu yang dibuat oleh Isaac Bickerstaff pada tahun 1709 untuk meramalkan kematian astrolog John Partridge. Istilah yang semakna dengan hoax dalam jurnalistik adalah libel, yaitu berita bohong, tidak benar, sehingga menjurus pada kasus pencemaran nama baik. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca untuk mempercayai sesuatu. Pemberitaan yang tidak berdasarkan kenyataan atau kebenaran (nonfactual) untuk maksud tertentu. Tujuan hoax adalah sekadar lelucon, iseng, hingga membentuk opini publik. Intinya hoax itu sesat dan menyesatkan, apalagi jika pengguna internet tidak kritis dan langsung membagikan berita yang dibaca kepada pengguna internet lainnyadengan adanya keraguan terhadap segala informasi yang diterima, masyarakat menjadi bingung. Kebingungan masyarakat ini dapat dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menanamkan kebencian, sehingga berpeluang terjadi perpecahan dan permusuhan. Kemajuan dan ragam media komunikasi yang dimiliki oleh masyarakat menyebabkan masyarakat dan negara menghadapi efek hoax sebagai akibat communication jammed yang terjadi di masyarakat. Communication jammed disebabkan oleh perkembangan teknologi komunikasi yang tidak bisa dikontrol lagi. Communication traffic yang sangat rumit menyebabkan berita-berita hoax sebagai suatu tindakan konstruksi sosial sederhana, namun menjadi musuh masyarakat dan negara. Bisa dikatakan sosialisasi UU ITE yang berkaitan tentang beretika atau sopan santun dalam bermedia sosial belum sempurna. Mereka para netizen masih sering terlihat menggunakan kata-kata sarkasme (kasar) ketika berkomentar ataupun membuat konten-konten "nyinyir" di media sosial seperti di Tik-Tok, Instagram, ataupun di Facebook. Dari hal ini jelas bahwa isi dari Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tahun 2008 masih harus dikaji lebih lanjut dan direvisi. Menurut Siberkreasi, Kominfo, Japelidi 2021 bahwa ada 4 pilar dalam menerapkan literasi digital, yaitu cakap digital (digital skill), budaya digital (digital culture), etika digital (digital etchics), keamanan digital (digital safety). Dari keempat pilar ini, ada dua pilar yang penting dalam membentuk jati diri bangsa Indonesia, yaitu budaya dan etika. Literasi budaya yang dimaksud adalah kemampuan diri dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai pancasila, dan bhineka tunggal ika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dilanjutkan dengan literasi etika yang diharapkan ialah kemampuan diri dalam menyadari, mencotohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola digital (attitude) dalam pergaulan setiap hari. Hal ini melanggar Pasal 27 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan Pasal 45 UU ITE, yang berbunyi : (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal tersebut masih berkaitan dengan judi online yang dimana memanfaatkan perkembangan teknologi dan internet kearah sisi negatif. Yurisdiksi dalam penanganan judi online mengacu pada kewenangan hukum untuk menegakan peraturan terhadap tindak pidana yang terjadi dalam ruang digital, ini mencakup tindakan yang melibatkan sistem elektronik yang berada di wilayah Indonesia maupun luar negara, yang memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku perjudian online, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri.

Efektivitas penegakan yurisdiksi dalam kasus perjudian online seringkali menghadapi tantangan, terutama karena sifat global dan anonim dari internet, yang mempersulit identifikasi dan penangkapan pelaku yang berada diluar yurisdiksi nasional, dalam penanganan perjudian online sangat bergantung pada implementasi antar penegak hukum yang dimana sering terkendala oleh beberapa faktor, salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan dalam Kerjasama internasional. Mengingat banyaknya operator perjudian online yang berbasis di luar negeri, penegakan hukum ini memerlukan kerjasama lintas negara yang kuat, termasuk perjanjian ekstradisi dan kolaborasi dengan penyedia layanan internet global. Tanpa dukungan internasional yang memadai upaya penegakan hukum ini akan menjadi kurang efektif karena sulit untuk menjangkau dan menindak pelaku yang berada di luar yurisdiksi nasional. Peningkatan efektivitas yurisdiksi dalam penanganan perjudian online merupakan Langkah krusial dalam melindungi Masyarakat dari dampak negative ketahanan siber ini, meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE), implemmentasi dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kerjasama internasional dan kemampuan teknologi.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang diuraikan oleh penulis, maka tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Analisis Yuridis Penetapan Tersangka Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 UU ITE Di Unit Cyber Crime Polda Banten.**

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Dalam metode penelitian ini dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta dan fenomena yang didapat secara objektif dilapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum, didapat melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten dengan masalah dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum terhadap Perjudian

Penegakan hukum adalah kegiatan penegak hukum dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan, menindak tindak criminal, memberikan sanksi kepada setiap pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku criminal. Penegakan hukum dilakukan secara terorganisir oleh semua sistem kepolisian dan penegak hukum yang lain. Perkembangan pola hidup Masyarakat berbanding lurus dengan berkembang dan semakin luasnya suatu kebiasaan, kebudayaan dan pengetahuan baru yang kemudian di salah

gunakan untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu kejahatan berkembang dengan kemajuan peradaban sebuah bangsa. Salah satu bentuk kejahatan yang tumbuh dan berkembang di Masyarakat saat ini adalah perjudian. Perjudian merupakan perbuatan yang merusak moral, dalam hukum, agama secara tegas dilarang, namun banyak orang yang menganggapnya sebagai mata pencarian yang wajar. Pelaku perjudian di Indonesia sudah menyebar hamper ke seluruh wilayah Indonesia dengan seiring berkembangnya teknologi, serta banyak orang yang terlibat didalam perjudian terutama dalam judi online mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dampak perjudian tentunya merupakan masalah bagi negara yang terus berupaya menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran Masyarakat. Dengan demikian negara harus menjadi pencegah judi yang membawa dampak negatif bagi kehidupan bangsa.

Peran penegak hukum sangat diperlukan untuk mencegah dan menaggulangi tindak perjudian. Kepolisian sebagai salah satu institusi yang mengemban Amanah sebagai penegak hukum memiliki tugas dan fungsi untuk mencegah dan menanggulangi segala bentuk kejahatan, termasuk perjudian.

Pada saat penulis mewawancarai anggota unit cyber crime polda banten yang Bernama Bripka okto fajar Nugroho SH berpendapat bahwa :

“Peran kepolisian dalam penegakan hukum khususnya judi online kita bisa melakukan Upaya preventif dan represif. Untuk Upaya preventif kita melakukan Upaya penyuluhan atau memberikan pemahaman kepada Masyarakat terkait bahaya judi online berikut dengan ancaman pidana dan denda, Adapun Upaya represif kita melakukan patroli siber dan melakukan penangkapan baik yang melakukan promosi, yang menyediakan atau yang memfasilitasi judi online tersebut”

Penegakan hukum tentunya bertujuan agar hukum dijalankan sebagaimana mestinya, hukum benar-benar ada dalam Masyarakat dan hukum memberikan efek jera sehingga perbuatan yang bertentangan dengan hukum tidak akan diulangi lagi, karena judi online akan terus menjalar kedalam Masyarakat dan tumbuh seperti suatu kegiatan yang menyimpang sehingga perlu penegakan hukum yang tidak hanya terhadap para pemain judi online saja tetapi juga terhadap orang-orang yang mendistribusikan dan mempromosikan serta bandar yang berperan dalam judi online tersebut agar memutus judi online dalam Masyarakat.

Pada saat wawancara dengan anggota unit cyber crime yaitu bripka Okto fajar Nugroho SH, beliau menambahkan Langkah atau alur penegakan hukum dan penetapan tersangka dalam kasus judi online ini, bahwa :

“ terkait alur dan Langkah dalam penetapan tersangka sampai dengan mendapatkan tersangka, kita melakukan patroli cyber setelah melakukan patroli cyber kita melakukan penyelidikan terhadap pemilik akun atau pengakses, selanjutnya Ketika kita sudah menemukan pemilik akun dan pengakses kita melakukan penyelidikan terhadap keberadaan terduga tersangka tersebut, selanjutnya setelah kita dapat keterangan dan alat bukti yang lain, kita melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka, tidak lupa dikuatkan atau didukung dengan perangkat atau device yang dia gunakan untuk melakukan tindak pidana judi online tersebut, untuk laporan terkait kasus ini ada beberapa laporan dari Masyarakat namun kebanyakan adalah temuan dari pihak kepolisian”.

Keberhasilan misi hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana perjudian online tidak hanya ditentukan oleh sempurnannya postulat hukum yang dirumuskan dalam hukum positif. Melainkan telah lebih dari itu keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya (penegak hukum) mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi. aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih didalam melakukan penyidikan,

pembuktian baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materiil maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pemidanaannya.

2. Yurisdiksi dalam penegakan hukum perjudian Online

Yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kedaulatan negara tidak akan diakui apabila negara tersebut tidak memiliki yurisdiksi. Setiap negara mempunyai kedaulatan dan aturan hukum yang harus dihormati oleh negara lain atau dengan kata lain setiap negara memiliki yurisdiksi. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari negara, di mana negara tersebut berdaulat, tetapi mempunyai batas-batasnya, yaitu ruang berlakunya kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah negara itu, diluar wilayahnya negara tersebut tidak lagi memiliki kekuasaan demikian. Berbicara mengenai batas suatu negara, hal ini berhubungan dengan masalah yurisdiksi negara tersebut, yaitu mengenai kewenangan negara untuk menegakan hukum di wilayahnya, kaitannya dengan internet yang merupakan suatu dunia tanpa batas, telah menimbulkan masalah tersendiri mengenai yurisdiksi yang akan diterapkan di dunia tanpa batas tersebut.

Pada saat penulis mewawancarai anggota unit cyber crime polda banten yang Bernama Bripka okto fajar Nugroho SH berpendapat bahwa :

“Faktor yang mempengaruhi terkait judi online ini adalah yurisdiksi atau ekstradisi terhadap negara-negara yang disana memang melegalkan atau dilegalkan terhadap judi online tersebut.”

Aspek global menimbulkan kondisi seakan-akan dunia tidak ada batasnya (bordless). Keadaan ini mengakibatkan pelaku, korban serta tempat dilakukannya tindak pidana terjadi di negara yang terjadi di negara yang berbeda-beda. Dalam ruang cyber pelaku pelanggaran sering kali menjadi sulit untuk dijerat karna hukum dan pengadilan Indonesia tidak memiliki yurisdiksi terhadap pelaku dan perbuatan hukum yang terjadi, tetapi akibatnya justru memiliki implikasi di Indonesia.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka daya berlaku kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) harus diperluas, sehingga tidak hanya mengacu pada asas/prinsip yang selama ini diambil dalam pasal 2-9 KUHP yaitu asas personal, asas territorial dan asas universal. Dimana hanya untuk kejahatan-kejahatan tertentu saja berlakunya KUHP tersebut bagi orang-orang yang melakukan kejahatan di luar wilayah Indonesia sebagaimana pasal 4 KUHP. Padahal cyber crime dapat dilakukan oleh orang dari luar wilayah Indonesia terhadap system elektronik dalam negeri Indonesia. Untuk ruang cyber dibutuhkan suatu hukum baru yang dibuat berdasarkan batas-batas wilayah. Ruang cyber dapat diibaratkan sebagai suatu tempat yang hanya dibatasi oleh screens dan password.

3. Faktor Penghambat dan Pendorong Kepolisian Dalam Menangani Kasus Judi Online

Penegakan hukum pidana untuk penanggulangan perjudian mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya salah satunya adalah karena perjudian telah menjadi kebiasaan bagi kalangan tertentu. Ironinya, kadang pola pikir para pelaku judi menganggap hal itu wajar dan sah untuk dilakukan, secara statistic memperlihatkan meningkatnya kasus yang terjadi, hal ini dapat dilihat dari menjamurnya perjudian khususnya perjudian online di tiap-tiap wilayah di Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam menangani kasus judi online ini adalah yurisdiksi yang dimana para bandar dan yang membuat situs kebanyakan berada di server luar negeri.

Pada saat penulis mewawancarai anggota unit cyber crime polda banten yang Bernama Bripka okto fajar Nugroho SH berpendapat bahwa :

“kita masih berupaya karna suatu kendala dan hambatan yaitu situs atau website judi online itu kita ketahui berada di luar negeri sehingga kita kesulitan untuk mendeteksi dimana keberadaan si penyedia judi online tersebut “

Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat seringkali disatu sisi kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan atau menangani kasus ini dibatasi oleh wilayah suatu negara yang berdaulat penuh sebagai batas dari bergerak bebas dari yurisdiksi hukum yang dimilikinya, disisi lain para pelaku kejahatan dapat bergerak bebas melewati batas negara, akibatnya sangat sulit bagi negara untuk mengungkap sekaligus menangkap pelaku kejahatan tersebut. Akibatnya, apabila diketahui adanya pelaku yang melarikan diri atau berada dalam wilayah negara lain, maka negara yang memiliki yurisdiksi atas si pelaku kejahatan, misalnya negara tempat kejahatan dilakukan atau negara-negara yang menderita akibat dari kejahatan itu tidak boleh melakukan penangkapan dan penahanan secara langsung di dalam wilayah negara tempat pelaku kejahatan itu berada. Hal ini sangat wajar mengingat setiap wilayahnya dimasuki oleh pihak lain tanpa seijin dari negara yang bersangkutan.

Adapun faktor pendorong kepolisian dalam menangani kasus judi online ini adalah dengan cara:

1. Personel

Terbatasnya sumber daya manusia merupakan suatu masalah yang tidak dapat diabaikan, untuk itu Polri mengirimkan anggotanya untuk mengikuti berbagai macam kursus di negara-negara maju. Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih didalam melakukan penyidikan, pembuktian baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materiil maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pemedanaannya.

2. Sarana dan prasarana

Peningkatan sarana dan prasarana dari prasarana yang dimiliki, faktor ini dapat dikatakan sebagai tulang punggung penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online. Sebab eksistensinya merupakan penopang keberhasilan untuk menemukan suatu kebenaran materiil. Oleh karena jalinan kerjasama yang harmonis antara lembaga penegak hukum dengan beberapa pakar dan spesialis di bidangnya seperti ahli forensik, pakar telematika, serta dana operasional yang memadai adalah merupakan faktor pendukung guna mengadili dan memidana atau mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana perjudian online.

3. Kerjasama dan koordinasi

Melakukan Kerjasama dalam melakukan penyidikan kasus cyber yang bersifat borderless dan tidak mengenal wilayah, sehingga Kerjasama dan koordinasi dengan aparat penegak hukum negara lain merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Keberhasilan misi hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana perjudian online tidak hanya ditentukan oleh sempurnannya postulat hukum yang dirumuskan dalam hukum positif. Melainkan telah lebih dari itu keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya (penegak hukum) mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi. aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih didalam melakukan penyidikan, pembuktian baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materiil maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pemedanaannya.

Dalam wawancara dengan anggota unit cybercrime bripta okto fajar Nugroho menambahkan bahwa:

“factor pendorong kepolisian dalam menangani kasus judi online ada undang-undang dan juga ketentuan presiden terkait pemberantasan judi online”.

KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan penelitian maka di dapat suatu kesimpulan dari isi dan pembahasan yaitu :

1. Prosedural penetapan tersangka kasus judi online di unit cyber crime Polda Banten, yaitu melakukan patroli cyber setelah melakukan patroli cyber pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap pemilik akun atau pengakses, selanjutnya Ketika sudah menemukan pemilik akun dan pengakses pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap keberadaan terduga tersangka tersebut, selanjutnya setelah mendapat keterangan dan alat bukti yang lain, pihak kepolisian melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka, tidak lupa dikuatkan atau didukung dengan perangkat atau device yang dia gunakan untuk melakukan tindak pidana judi online tersebut berupaya, untuk laporan terkait kasus ini ada beberapa laporan dari masyarakat namun kebanyakan adalah temuan dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian juga melakukan upaya preventif dan represif, Untuk Upaya preventif pihak kepolisian melakukan upaya penyuluhan atau memberikan pemahaman kepada Masyarakat terkait bahaya judi online berikut dengan ancaman pidana dan denda, adapun upaya represif dengan melakukan patroli siber dan melakukan penangkapan baik yang melakukan promosi, yang bermain judi online dan yang menyediakan atau yang memfasilitasi judi online tersebut. Pihak kepolisian juga berupaya untuk memberantas judi online ke tingkat yang lebih tinggi dengan menangkap para bandar dan pembuat situs dengan cara meningkatkan efektivitas yurisdiksi dan ekstradisi serta meningkatkan kerjasama dengan negara lain dikarenakan diketahui bahwa para bandar dan pembuat situs ini berada diluar negeri sehingga dengan meningkatkan efektivitas yurisdiksi dan ekstradisi serta meningkatkan Kerjasama dengan negara lain sangat penting untuk memberantas perjudian online. Langkah dan upaya tersebut menjadi cara polisi dalam menetapkan tersangka dalam kasus judi online tersebut. Keberadaan dan pemanfaatan internet saat ini seperti pedang bermata dua, selain memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia ternyata dapat menjadi sarana untuk melakukan perbuatan melawan hukum, para pelaku memanfaatkan perkembangan internet sebagai sarana dan media untuk melakukan tindak pidana perjudian, yang dimana menguntungkan mereka karna proses perjudian tidak harus bertemu secara langsung, dan mudahnya untuk mengakses situs-situs judi online tersebut.ironisnya pandangan Masyarakat masih banyak yang menganggap fenomena ini adalah hal yang sangat biasa, hal ini dianggap oleh masyarakat adalah suatu hiburan, yang dimana akan berdampak buruk bagi Masyarakat. Perjudian secara online telah diatur secara khusus dalam pasal 27 ayat 2 UU ITE dan Undang-Undang Republik Indonesia no 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur bahwa : “Setiap Orang yang dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Orang yang melanggar ketentuan pasal tersebut berpotensi dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 10 miliar rupiah, sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 3 UU 1/2024 Sanksi pidana dan denda sudah sangat jelas tertera dalam pasal tersebut, namun hingga sat ini kasus judi online terus meningkat.

2. Faktor penghambat dan pendorong polisi dalam menangani kasus judi online di unit cyber crime Polda Banten, yaitu karena perjudian telah menjadi kebiasaan bagi kalangan tertentu. Ironinya, kadang pola pikir para pelaku judi menganggap hal itu wajar dan sah untuk dilakukan, Polisi terus berupaya menangani berbagai kasus judi online dengan menangkap sejumlah tersangka, namun begitu, sebagian besar yang ditangkap adalah para pemain serta yang mempromosikannya dan belum ada pelaku setingkat bandar yang berhasil ditangkap, yang dimana sejumlah pihak beranggapan bahwa penangkapan pelaku judi online baru menysasar ke level bawah saja, dalam wawancara dengan anggota cybercrime polda banten Bripka Okto fajar Nugroho SH beliau menjelaskan bahwa : “ kita masih berupaya dalam menangani kasus ini agar bandar bisa ditangkap namun suatu kendala dan hambatan yaitu situs dan website judi online itu kita ketahui berada di luar negeri sehingga kita kesulitan untuk mendeteksi Dimana pastinya keberadaan si penyedia atau bandar judi online tersebut yang Dimana yurisdiksi terhadap negara-negara yang disana memang melegalkan kasus judi online tersebut. Adapun yang kami amankan yaitu kaitannya dengan seseorang yang melakukan judi online dan mempromosikan judi online melalui story maupun bio sosial media lainnya.” Efektivitas penegakan yurisdiksi dalam kasus perjudian online seringkali menghadapi tantangan, terutama karena sifat global dan anonim dari internet, yang mempersulit identifikasi dan penangkapan pelaku yang berada diluar yurisdiksi nasional, dalam penanganan perjudian online sangat bergantung pada implementasi antar penegak hukum yang dimana sering terkendala oleh beberapa faktor, salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan dalam Kerjasama internasional. Mengingat banyaknya operator perjudian online yang berbasis di luar negeri, penegakan hukum ini memerlukan kerjasama lintas negara yang kuat, termasuk perjanjian ekstradisi dan kolaborasi dengan penyedia layanan internet global. Tanpa dukungan internasional yang memadai upaya penegakan hukum ini akan menjadi kurang efektif karena sulit untuk menjangkau dan menindak pelaku yang berada di luar yurisdiksi nasional. Peningkatsn efektivitas yurisdiksi dalam penanganan perjudian online merupakan Langkah krusial dalam melindungi Masyarakat dari dampak negative ketahatan siber ini, meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE), impelementasi dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kerjasama internasional dan kemampuan teknologi. Faktor pendorong pihak kepolisian dalam menangani kasus judi online ini adalah dengan adanya undang-undang dan keppres atau keputusan presiden dalam pemberantasan judi online.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015
- Sugeng,S.P., Hukum Telematika Indonesia, Prenadamedia group, Jakarta, 2020
- Budi suhariyanto SH.MH, Tindak pidana teknologi informasi (urgensi pengaturan dan celah hukumnya), PT rajagrafindo persada, Jakarta, 2014
- Dr.Yurizal,SH.MH, Penegakan hukum tindak pidana cyber crime, media nusa creative, malang, 2018
- Drs. Dikdik, M. Arief mansur,SH.,MH, Elisatris Gultom,SH,MH. Cyberlaw (aspek hukum teknologi informasi), PT Refika aditama, bandung, 2009

b. Jurnal

Jurnal Analisis kecanduan judi online (studi kasus pada siswa smk an nas mandai maros kabupaten

- maros) Oleh : Asriadi, Universitas Negeri Makasar, jurnal eprints universitas negeri makasar 2021
- Jurnal Dampak fenomena judi online terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja (studi di kampusnet data media cabang sadewa kota semarang), Oleh : Achmad zurhman, Tri marhaeni pudji astuti dan Tjaturahono budi sanjoto, journal of educational social studien Universitas negeri semarang 2016.
- Jurnal Tinjauan yuridis terhadap lemahnya penanganan tindak pidana judi online, Oleh : Imelda sonia rumbay, franciskus x takudung, Debby telly antow, E-Journal Universitas Sam ratulangi Lex Privatum Vol.XI/No.5/jun/2023.
- Jurnal Faktor yang mempengaruhi mahasiswa melakukan perjudian online, Oleh : Abi Arsyian Makarim Subagyo, Laras Astuti, Indonesian journal of criminal law and criminology (IJCLC) Volume. 3, Issue. 3, November 2022, 180-189
- Jurnal Fenomema Judi online dikalangan generasi muda, Oleh Riski kamila julianti, Muhammad Satria, Reza Mauldy Raharja, Wika Hardika Legiani, Khatulistiwa : Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 4 No. 2 Juni 2024.
- Jurnal Kepastian hukum penggunaan pasal 27 ayat 2 UU ITE dalam perjudian, Oleh : Muh.Miqdad al qifri, Tanudjaja, Bambang Arwanto, Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
- Jurnal Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positifme hukum, Oleh : Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, jurnal crepido Volume 01, Nomor 01, Juli 2019
- Jurnal Teori keadilan dalam perspektif filsafat hukum islam dan barat, Oleh : Fuji Rahmadi P, Jurnalilmu syariah, perundang-undangan dan hukum ekonomi syariah januari-juni 2018
- Jurnal Asas kepastian hukum menurut para ahli, Oleh : Siti Halilah, Mhd. Fakhurrahman Arif, : Jurnal Hukum Tata Negara e-ISSN: 2656-9671, p-ISSN:2685- 6077 Volume 4, II (Desember 2021),
- Jurnal kajian filosofi tentang konsep keadilan dari pemikiran klasik sampai modern, Oleh : Bahder Johan Nasution, Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014
- Jurnal Penerapan pasal 303 kitab undang-undang pidana tentang perjudian, Oleh : Christy Prisilia Constansia Tuwo, Lex Crimen Vol. V/No. 1/Jan/2016
- Jurnal Dampak fenomena judi online terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja, Oleh : Achmad Zurhman, Tri Marhaeni Pudji Astuti dan Tjaturahono Budi Sanjoto, Journal of Educational Social Studies JESS 5 (2) (2016)
- Jurnal Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online studi kasus wilayah kepolisian resus subang jawa barat, Oleh : Husain Rahmat Hidayat , Nurwati , Dadang Suprijatna, Karimah Tauhid Volume 3 Nomor 3 (2024).
- Jurnal Tinjauan yuridis terhadap cyber crime, Oleh : Ronal, Legal Opinion 7320 24427 1 PB.
- Jurnal Yurisdiksi hukum pidana dalam dunia maya, Oleh : Yuliana surya galih, Jurnal Unigal Volume 7 No. 1- Maret 2019.
- Jurnal Lemahnya kepolisian dalam penanganan tindak pidana perjudian togel online di kota gorontalo, Oleh : Aniza Lakoro, Lisnawaty W. Badu, Nuvazria Achir, Jurnal legalitas Vol.15 No.1
- Jurnal Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya, Oleh : Christiany Juditha, Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1, April 2018: 31-44
- Jurnal Tinjauan yuridis normative perjudian online menurut hukum positif di Indonesia, Oleh : Enik Isnaini, Jurnal Independent Vol 5 No. 1

c. Internet

- Rika pangesti, <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/220529-792-kasus-judi-online-di-indonesia-diungkap-ribuan-tersangka-ditangkap-polri-beri-ancaman-ini>
- Eva rianti, <https://news.republika.co.id/berita/rh6cyo380/polda-banten-ungkap-39-kasus-judi-89-orang-jadi-tersangka>
- Gisella Previa Laoh, <https://news.detik.com/berita/d-7318490/peran-11-tersangka-judi-online-di-rumah->

Nanda perdana putra, <https://www.liputan6.com/news/read/5625401/dikritik-tak-bisa-tangkap-bandar-besar-judi-online-begini-respons-polri>

Renata christha aulia,S.H, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-2-uu-ite-2024-tentang-ijudi-online-i-lt65afa86471ccc/>

Muhammad nafis S.H.,M.H, <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/499611/penegakan-hukum-di-dunia-maya-yurisdiksi-dalam-kasus-perjudian-online-di-indonesia>